

# STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR POTENSIAL KOTA BATAM DAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

*(Economic Growth Structure and Potential Sectors of Batam Municipal  
and Karimun Regency of the Riau Islands Province)*

Mandala Harefa\*

\*P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik, Jl. Jend. Gatot Subroto, Ged. Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,  
email: mandnias@yahoo.com.

Naskah diterima: 25 Oktober 2013  
Naskah direvisi: 8 November 2013  
Naskah diterbitkan: 31 Desember 2013

## Abstract

*Decentralization policy through provision of local authority in determining the planning and economic development direction has put local governments in a more serious position in their attempts to optimize all the potentials to be developed. Implementations of local autonomy within the last decade, in several autonomous regions, have not shown the expected results as perceived by the public. This recurring problem is due to some existing issues within autonomous regions in their effort to develop their economic potentials. Some particular overview on Riau Islands Province showed that the province has a lot of potentials to explore. Its potentials are in relations to support economic development. For that reason, an analysis has been conducted in Batam Municipal and Karimun Regency in order to determine and compare the structure, growth patterns and its potentials as an economic base. By using secondary data of Gross Regional Domestic Product (GRDP) at Constant Prices for growth, contribution, and per capita will be known potentials economic base in both regions. Using a data collection method, that is documentation method, analysis is conducted using analysis tool of Location Quotients (LQ). The analysis showed that Batam Municipal and Karimun Regency have a different economic base. Karimun Regency has more economic potentials as the basis of economic growth that should be the mainstay of the Regency compare to Batam Municipal. Nevertheless, although Batam Municipal and Karimun Regency are free trade areas, they have not reached the expected level of economic growth.*

**Keywords:** decentralization, autonomy, economic growth, economic base, potential sectors, GRDP

## Abstrak

Kebijakan desentralisasi melalui pemberian kewenangan daerah dalam menentukan perencanaan dan arah pembangunan perekonomian, menuntut pemerintah daerah berupaya lebih serius dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sebagai sektor potensial. Implementasi otonomi yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, dalam pelaksanaan di beberapa daerah otonom belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bisa terjadi pada daerah otonom mengingat masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan potensi ekonominya. Demikian pula bila melihat secara spesifik Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik berpeluang dalam menggali berbagai potensi ekonomi yang ada dalam rangka menjadikan basis ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menganalisis masalah ini, diambil studi Kota Batam dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan struktur, pola pertumbuhan dan potensi yang menjadi basis ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, baik pertumbuhan, kontribusi, dan per kapitanya akan diketahui potensi basis ekonomi kedua wilayah tersebut. Melalui metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis *Location Quotients* (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun memiliki basis ekonomi yang berbeda, di mana Karimun memiliki potensi ekonomi lebih banyak sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi andalan. Namun demikian, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang merupakan kawasan perdagangan bebas, belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

**Kata kunci:** desentralisasi, otonomi, pertumbuhan ekonomi, basis ekonomi, sektor potensial, PDRB

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal tujuan dari pendelegasian kewenangan melalui otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan

dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah lebih satu dasawarsa implementasi otonomi daerah harapan untuk mencapai kondisi yang diharapkan belum juga terwujud. Merujuk pada pengalaman negara lain, satu dasawarsa lebih semestinya menjadi titik waktu perpindahan fase transisi ke konsolidasi desentralisasi. Namun dalam implementasinya, desentralisasi yang

diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah justru tidak menunjukkan perkembangan yang diharapkan, yang ditandai oleh belum juga nampak bermanfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat, khususnya dalam mengangkat perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah disertai harapan besar bahwa itulah jalan ideal dalam memperkuat demokrasi lokal dan bahkan nasional, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kapasitas teknokrasi negara; mendorong realokasi nilai, kekuasaan, dan sumber daya ekonomi; serta mengakselerasi pembangunan yang lebih bermutu.

Sampai akhir tahun lalu, dari 34 provinsi dan 491 kabupaten serta kota, hanya beberapa yang menunjukkan kinerja positif atau menunjukkan kecenderungan baik. Kinerja itupun hanya dinikmati oleh daerah yang sejak awal telah siap secara kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM), selain tentunya sumber daya ekonomi atau memiliki sumber daya alam (SDA) yang memadai seperti Jawa, sebagian Sumatera, dan Kalimantan. Bahkan Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Sedangkan untuk daerah yang belum siap dan tidak memiliki sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil yang memadai untuk pembangunan ekonominya. Implikasinya daerah-daerah yang bisa dikatakan minim tersebut mencari-cari berbagai cara untuk memperoleh pendapatan bagi daerahnya. Sehingga banyak dari daerah otonom memanfaatkan kewenangan tersebut yang menimbulkan kontra produktif bagi perkembangan ekonominya. Banyak kewenangan daerah baru diterjemahkan menjadi keleluasaan menetapkan beberapa peraturan daerah (Perda) yang amat tidak kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal. Fokus dari langkah dan kebijakan daerah masih seputar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang justru dapat berdampak *inflatoir*, jika tidak dikatakan justru menciptakan ketidakpastian baru di daerah yang sangat mengganggu bagi aktivitas investasi yang memiliki potensi sebagai basis ekonomi di suatu daerah.

Mengacu pada perkembangan ekonomi yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dalam menggali potensi

sesuai lapangan usaha atau sektor yang ada pada daerahnya. Langkah ini dapat dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing produk-produk yang memiliki karakteristik agar dapat mendukung struktur ekonomi yang kuat. Dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh daerah dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu tetap dijaga agar dapat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, sampai pertengahan tahun 2012, rasanya tidak terlalu banyak daerah otonom yang telah secara konsisten merencanakan, memilih, dan menerapkan suatu strategi pengembangan potensi ekonomi lokal. Bahkan beberapa studi ilmiah dan laporan media massa menunjukkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan terhadap arah perjalanan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu keniscayaan belaka, karena sukar sekali diharapkan suatu pengembangan ekonomi yang dapat kompatibel dengan kebutuhan dan potensi daerah apabila nuansa sentralistis masih terlalu kental. Dalam teori ekonomi menjelaskan bahwa konsep desentralisasi ekonomi itu tidak lain adalah tuntutan efisiensi dan skala ekonomi yang lebih adil antara pusat dan daerah, sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial dalam skala yang lebih makro.

Salah satu daerah yang merupakan hasil pemekaran adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di mana wilayah ini merupakan daerah otonom yang diharapkan menjadi model berkaitan dalam pengembangan perekonomian dengan adanya 3 kawasan ekonomi khusus (KEK). Namun demikian, dari hasil evaluasi terakhir tahun 2011, Provinsi Kepri terperosok pada peringkat 16 pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi secara nasional. Sedangkan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran Provinsi Kepulauan Riau juga turun peringkat. Pada evaluasi tahun sebelumnya Kepri diperingkat teratas, pada evaluasi tahun ini Kepri ada di peringkat ke-5 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 120-277 Tahun tertanggal 21 April 2011. Penilaian itu didasarkan pada keseriusan untuk kesejahteraan masyarakat (30 persen), mewujudkan pemerintahan yang baik bersih (*good governance*) sebanyak 25 persen, peningkatan pelayanan publik (25 persen), dan meningkatkan daya saing daerah (20 persen). Pada tingkat Kabupaten, Karimun dinilai sebagai kabupaten hasil pemekaran berprestasi terbaik di Kepri, meskipun peringkatnya berada di peringkat 15. Perinciannya, kesejahteraan masyarakat (17,35

<sup>1</sup> "Otonomi dan Keuangan Daerah, Masih Jauh Panggang dari Api", (<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/07/31/232685>, 31 Juli 2013).

persen), *good government* (16,48 persen), pelayanan publik (13,36 persen) dan daya saing (4,95 persen) dengan total nilai 52,15 persen. Sementara peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran untuk Kota di Provinsi Kepri, adalah Batam di peringkat 8 dengan perinciannya, kesejahteraan masyarakat (21,03 persen), *good government* (18,16 persen), pelayanan publik (10,81 persen), dan daya saing (5,77 persen).<sup>2</sup>

Dari sisi kinerja ekonomi, percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang diharapkan setelah berstatus zona perdagangan bebas yang berbentuk KEK, ternyata angka pertumbuhan ekonomi kawasan itu justru lebih rendah dibanding daerah yang tidak kawasan ekonomi khusus (KEK). Sebagai daerah yang diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah pusat, Kepri khususnya, kawasan zona perdagangan bebas atau *free trade zone* mestinya memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan target, yaitu 10 persen atau secara realistis 8 persen, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Namun, angka pertumbuhan saat ini masih di kisaran 7 persen. Evaluasi yang dilakukan Kadin Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan KEK tersebut salah satu faktor adalah tidak berjalannya pelaksanaan FTZ adalah pengelola kawasan tidak fokus terhadap potensi ekonomi pada kawasan tersebut. Kita ketahui bahwa pejabat Dewan Kawasan juga menjabat di instansi penting pemerintah lainnya sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengelola kawasan Batam dan Karimun. Rantai birokrasi yang panjang menjadi tidak efisien sehingga investor membutuhkan waktu lama untuk mengurus perijinan. Hal ini menimbulkan keengganan dan bahkan tidak sedikit yang mengurungkan niat. Seharusnya kawasan Batam dan Karimun bisa tumbuh lebih cepat seperti yang terjadi di kawasan Iskandariyah Johor, Malaysia, atau China. Namun sampai saat ini, kawasan tersebut belum mengalami pertumbuhan yang berarti. Ironisnya, kawasan Johor yang pembangunannya dimulai setelah Batam justru mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Padahal dalam perencanaan awal kawasan Batam dan Karimun berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan Singapura dan berada di jalur lintasan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, yang membawa hampir separuh muatan kargo dunia. Kondisi itu justru belum dimanfaatkan secara maksimal oleh otoritas pengelola kawasan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> "Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran: Peringkat Kepri Turun ke Urutan Kelima", ([http://batamtoday.com/detail\\_berita.php?id=3432](http://batamtoday.com/detail_berita.php?id=3432), diakses 26 April 2011).

<sup>3</sup> "Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, Perlu Direstrukturisasi Menata Ulang Kawasan FTZ BBK", *Koran Jakarta*, 2 Maret 2013.

Perkembangan ini pun juga terlihat dalam suatu kawasan Kota Batam misalnya direncanakan menjadi daerah industri yang bisa bersaing dengan negara lain, kini sumbangannya kepada negara menurun. Bahkan sebelum era reformasi sumbangan kepada negara sebesar 17 persen, kini hanya tujuh persen. Tentunya untuk mengembalikan Batam sebagai daerah industri yang kompetitif, maka perlu upaya khusus dengan mengembalikan kawasan yang tersebut sesuai potensi agar pertumbuhan lebih cepat di berbagai sektor ekonomi.<sup>4</sup> Melihat kondisi tersebut, tentunya ada beberapa tantangan ke depan dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. Namun demikian, Provinsi Kepri yang memiliki kewenangan dalam mengelola perekonomian, harus memiliki perencanaan untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial. Untuk itu, tentunya perlu memetakan potensi-potensi ekonomi yang ada di Provinsi Kepri, terutama wilayah yang sudah merupakan kawasan ekonomi, dalam hal ini Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

## B. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut maka dapat diperoleh gambaran bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kawasan ekonomi dengan fasilitas khusus masing-masingnya memiliki karakteristik. Sejak semula Kota Batam misalnya didesain sebagai sebuah kawasan berkaitan dengan industri dan pengolahan. Namun demikian ekspektasi yang diharapkan dalam memacu pertumbuhan ekonominya sesuai dengan potensi mengalami berbagai permasalahan. Demikian pula Kawasan Karimun yang memiliki berbagai potensi ekonomi terutama sektor penggalian dan tambang, ternyata pertumbuhan ekonominya masih berjalan lambat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi stimulan agar pembangunan ekonomi disusun berdasarkan sektor basis masing-masing kawasan tersebut. Sehingga basis ekonomi tersebut menjadi potensi dan mampu menjadi motor penggerak untuk tumbuh dan berkembangnya sektor basis tersebut. Apabila sektor basis berkembang dengan baik, maka penerimaan daerah secara tidak langsung akan meningkat. Pengembangan potensi daerah dan penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor basis yang merupakan potensi daerah.

Dengan melakukan kajian terhadap struktur ekonomi potensi wilayah Provinsi Kepri secara umum dan Batam serta Karimun secara lebih mendalam, maka akan dapat diketahui pergeseran-pergeseran pada sektor-sektor ekonomi di Kota Batam dan Kabupaten

<sup>4</sup> "Habibie-Menyasal-Soal-Batam", (<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/30/058517646>, diakses 30 September 2013).

Karimun tersebut, serta mengetahui sektor-sektor potensial di daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat memprioritaskan perencanaan pengembangan terhadap seluruh sektor-sektor baik yang menjadi sektor potensial maupun yang tidak potensial dalam struktur perekonomian di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Untuk sektor yang potensial diupayakan menjadi basis yang diharapkan mampu mengangkat sektor-sektor atau lapangan usaha lain untuk lebih maju lagi, sehingga pergeseran sektoral dalam perekonomian dengan melihat pertumbuhan ekonominya dapat berjalan bersamaan meskipun dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas muncul pertanyaan untuk mengetahui lebih dalam mengenai (1) bagaimana perkembangan PDRB per sektor lapangan usaha pada tahun 2009 sampai dengan 2011 di Provinsi Kepri secara umum dan Kota Batam serta Kabupaten Karimun? dan (2) sektor basis ekonomi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun serta sektor-sektor ekonomi mana yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi?.

### C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan PDRB per sektor lapangan usaha pada tahun 2009 sampai dengan 2011 di Provinsi Kepri secara umum dan Kota Batam serta Kabupaten Karimun;
2. Menganalisis sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun dan sektor-sektor ekonomi mana yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alternatif informasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi untuk wilayah pada kawasan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan Kabupaten Riau. Namun demikian analisis ini juga merupakan informasi yang bermanfaat bagi proses kebijakan dalam tingkat yang lebih tinggi terkait pembahasan mengenai pengelolaan kawasan khusus. Terutama bagi lembaga perwakilan DPR RI, analisis ini dapat dimanfaatkan bagaimana arah kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi pada era otonomi, sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

## II. KERANGKA TEORI

Dalam konsep ekonomi pembangunan suatu wilayah atau regional baik pada lingkup nasional, provinsi maupun kota/kabupaten potensinya dapat diukur. Salah satunya yang penting adalah pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB) dan pendapatan per kapita serta struktur ekonomi sektoral yang lebih modern. Dari model pendapatan regional seperti yang diungkapkan oleh Airov, Engerman, dan Peacock,<sup>5</sup> dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan stabilisasi regional atau daerah. Karena pengeluaran pemerintahan dalam tingkatan manapun adalah salah satu variabel-variabel pengeluaran otonom, maka konsep ini pun dapat dipergunakan dalam mengkaji implikasi yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan tingkat pengeluaran pemerintah secara keseluruhan dan penyebarannya secara regional. Namun perbedaan pokok dalam menganalisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa dalam analisis tersebut menitikberatkan terjadinya perpindahan faktor-faktor ekonomi. Sulit membayangkan bahwa daerah-daerah menerapkan perekonomian tertutup, asumsi ini tidak dapat diterapkan dalam ekonomi regional terutama dalam suatu negara.

Konsep ini merupakan bentuk model pendapatan regional sederhana dari *export base theory* yang dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini merupakan penyederhanaan suatu sistem regional yaitu daerah yang menjadi objek kajian dengan daerah yang di atasnya, dengan membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor *nonbasis*. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan *nonbasis* adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Asumsinya adalah bahwa ekspor atau pemindahan barang dan jasa merupakan satu-satunya unsur yang otonom dalam pengeluaran.

<sup>5</sup> Joseph Airov, "Fiscal Policy Theory in an interregional Economy: General Inter-Regional Multipliers and their Application", *Papers and Proceedings of Regional Science Associations*, Vol. 19, 1967, pp. 83 -108 and R. A. Engerman, "Regional Aspects of Stabilisation Policy" dalam Musgrave, *Essays in Fiscal Federalism*, *Brookings Institution*, Washington DC., 1965, pp. 7-62.

<sup>6</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Edisi 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 53.

Semua komponen yang dihasilkan lainnya dianggap fungsi dari pendapatan dan fungsi pengeluaran serta fungsi impor kedua-duanya diasumsikan tidak mempunyai intersep.

Diakui konsep teori basis ekonomi ini mengandung kelemahan, namun berdasarkan studi empiris yang dilakukan dalam rangka upaya memilah sektor-sektor basis ekonomi dari sektor-sektor bukan basis suatu daerah atau kota di mana kebanyakan studi seperti yang dilakukan oleh Pfouts<sup>7</sup> dan Tiebout<sup>8</sup>. Analisis ini akan bermanfaat jika kita mengetahui keterbatasannya, di mana hasilnya dapat dipergunakan sebagai sarana memahami struktur ekonomi daerah yang bersangkutan.

Analisis basis sebenarnya berkaitan dalam identifikasi basis penghasil, namun adanya kesulitan data-data indikator-indikator pendapat regional merupakan permasalahan yang selalu dihadapi. Oleh karena metode ini membaginya ke dalam kategori basis dan sektor. Yang biasa dilakukan adalah dengan metode-metode langsung yaitu metode *location quotient* (LQ) atau kuosien lokasi beserta varian-variananya.

Richardson, Harry W,<sup>9</sup> mengembangkan suatu model ekonomi regional yaitu basis ekonomi. Model ini dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah. Dalam model ini kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibedakan menjadi dua sektor yaitu basis dan sektor.

Sektor basis yaitu sektor yang mampu melayani pasar di dalam dan di luar daerah. Sedangkan sektor-sektor hanya mampu melayani pasar di dalam daerah itu sendiri. Teori basis ini disebut Analisis Basis, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan basis. Berkembangnya pendapatan di sektor basis akibat mampu secara luas menjual produknya baik di dalam dan ke luar daerah akan meningkatkan pendapatan regional secara langsung yang dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Karena terjadinya arus pendapatan dari luar daerah mendorong permintaan pada sektor-sektor yang menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah.

Setiap pertumbuhan sektor basis dan sektor memiliki efek ganda terhadap perekonomian wilayah. Bertambahnya aktivitas pada sektor basis akan menimbulkan pertambahan pendapatan arus

ke dalam, sehingga permintaan barang dan jasa hasil basis dan sektor akan meningkat. Untuk keperluan menentukan sektor basis digunakan metode LQ. Untuk mengukur tingkat konsentrasi dari suatu kegiatan industri dengan cara membandingkan peran suatu industri di suatu daerah dengan industri sejenis dengan cakupan yang lebih luas (nasional).

Metode ini secara *arbitrer* menentukan sektor-sektor dalam kategori kegiatan ekonomi seperti manufaktur, pertanian, industri perdagangan, transportasi atau jasa-jasa atau kelompok sektor distribusi, kegiatan pemerintah lokal, perbankan, keuangan, atau jasa-jasa lainnya. Selain itu pula metode LQ ini dapat dimodifikasi melalui kelompok sektor-sektor bauran. Sektor-sektor basis tidak hanya sektor-sektor ekspor saja tetapi juga mencakup semua kegiatan yang tidak erat kaitannya pada tingkat kegiatan ekonomi di dalam daerah yang bersangkutan dalam memacu pertumbuhan ekonominya.

Dalam kaitan tersebut daerah paling tidak harus memiliki potensi ekonomi untuk dijadikan pemacu pertumbuhan. Konsep ini mempunyai nilai yang cukup berarti dikarenakan mampu menawarkan suatu analisis keterkaitan antara ekonomi regional, perkotaan maupun nasional. Pengertian *growth pole* masih sangat sulit untuk didefinisikan, sebagian mencoba menggambarkan perbedaan antara *growth pole* dan *growth center*, dengan mengkaitkan antara kegiatan industri atau kegiatan sektor lainnya dan juga berkaitan dengan tingkat konsentrasi daerah di mana seluruh aktivitasnya terlokalisir.

Perkembangan belakangan ini mengenai analisis kutub pertumbuhan terutama bersumber pada para ahli ekonomi Perancis, seperti *Perraoux*, yang berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial, sebagaimana halnya dengan perkembangan industri, adalah bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah; perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap kegiatan perekonomian yang merupakan potensi daerah.<sup>10</sup>

Lebih spesifik konsep ini dikemukakan oleh *Boudeville* menyatakan, *a set of expanding industries located in an urban area and inducing further development of economic activity through out its zone of influence*, yang bisa diartikan bahwa kutub pertumbuhan regional sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan

<sup>7</sup> Ralf W. Pfouts, *The techniques Of Urban Economic Analysis*, (West Trenton New Jersey: Chander Davis-Publishing Company, 1960), p. 82.

<sup>8</sup> Charles Mills Tiebout, "The Community Economic Base Study", *Committee for Economic Development*, New York, December 1962, p. 29.

<sup>9</sup> Harry W. Richardson, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI), dalam Yudithia, 2000, hal. 8.

<sup>10</sup> F. Perraoux, *La Notion de Pole de Croissance, l'economic de Xxeme Siecle*, Second Part, Presses Universitaires de France, 1964, p. 143.

ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya.<sup>11</sup> Potensi ekonomi daerah yang merupakan *growth pole* (kutub pertumbuhan) ini terkait dalam konteks ruang (*spatial context*). Dengan demikian suatu *growth pole* telah didefinisikan sebagai sekelompok dari potensi sektoral menjadi kegiatan agro industri-industri jasa dan industri manufaktur yang mampu membangkitkan pertumbuhan dinamis dalam sistem perekonomian dan mempunyai hubungan yang kuat antara keterkaitan input dan output dalam industri hulu.

Pendekatan *growth pole* cukup menarik bagi pembuat kebijakan dikarenakan pendekatan ini mampu menyajikan kesempatan-kesempatan untuk menciptakan kebijaksanaan industri yang terpadu, baik perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi *interregional* dan *intraregional*. Dalam konteks negara berkembang, pendekatan ini mampu menjadi sebuah hubungan yang kritis (*critical link*) di antara perencanaan ekonomi regional dan perencanaan *intraregional*.

Sebagai contoh penggunaan strategi *growth pole* untuk mengisi jarak (*gaps*) dalam hirarki perkotaan nasional mungkin mampu merangsang sebuah sistem perkotaan nasional dengan mencoba mengembangkan potensi-potensi yang tersebar dalam pembangunan dan inovasi-inovasi berkembang di sekitarnya. Namun demikian pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana strategi itu dilaksanakan, sangat sulit untuk dijawab, seperti seberapa besar sebaiknya *growth pole* itu mempunyai batasan pengembangan.

Namun dari semua kerangka berpikir perlu adanya perencanaan, seperti yang dikemukakan Dickson yang menggambarkan perencanaan sebagai pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa, berapa banyak, bagaimana, bila dan di mana akan diproduksi, serta buat siapa akan dialokasikan, oleh badan pengambil keputusan yang berwenang dan dasar pengamatan menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai suatu kesatuan.<sup>12</sup>

### III. METODOLOGI

#### A. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan analisis jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tercatat dan sudah dipublikasikan, baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, terutama data-data yang diterbitkan oleh BPS dan pedoman, ataupun peraturan, regulasi serta perundangan terkait lainnya atau sumber data (dari

instansi terkait) ataupun dari berbagai hasil kajian literatur (studi kepustakaan) yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan alat analisis adalah dengan metode *Location Quotion* (LQ) atau kousien lokasi untuk mengetahui sektor basis. Sedangkan sumber data bersifat sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar potensi ekonomi yang merupakan kontribusi terbesar terhadap kegiatan perekonomian suatu daerah yaitu membandingkan antara proporsi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Model LQ tersebut yaitu dengan cara membandingkan indikator-indikator ekonomi wilayah Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik provinsi dengan beberapa pulau dengan daerah/regional di atasnya yaitu secara nasional. Atau perbandingan wilayah Kepulauan Riau dengan tingkat kota atau kabupaten dalam wilayah provinsi yang telah memiliki kawasan ekonomi khusus. Selain itu, pemilihan provinsi sebagai pembanding dalam mengukur potensi dan kinerja ekonomi wilayah sebuah provinsi atau kabupaten atau kota ini apakah suatu daerah administratif telah terbukti menggali potensi dari sektor ekonominya menjadi andalan pendapatan daerahnya untuk membiayai operasi pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah (Produk Domestik Regional Bruto /PDRB) yang terdiri dari sembilan sektor ekonomi. Bila kemampuan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi atau paling tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional atau provinsi, maka secara deduktif dapat disimpulkan bahwa daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam suatu wilayah mampu menjadi menjadi daerah otonom dengan mengandalkan potensi ekonomi daerah. Dengan metode ini tidak saja diaplikasikan dan bermanfaat bagi daerah tingkat kabupaten saja, namun dapat diaplikasikan untuk mengkaji potensi ekonomi suatu provinsi yang merencanakan menjadi otonom atau suatu kawasan yang berbatasan dengan suatu negara.

#### B. Model *Location Quotient*

Dalam analisis ini digunakan formula aplikatif guna mengukur potensi sektor ekonomi yang bisa diunggulkan dari daerah bersangkutan. Cara yang aplikatif dan paling mudah untuk mengetahui apakah suatu sektor ekonomi berpotensi maka digunakan model *Location Quotient* (LQ) dengan formula. Bila  $V_i^R$  dan  $V^R$  masing-masing nilai tambah total sektor  $i$  dan semua sektor di daerah  $R$ . Sedangkan  $V_i$  dan  $V$  menunjukkan jumlah keseluruhannya pada tingkat

<sup>11</sup> J. Boudeville, *Problems of Regional Economic Planning*, Edinburg University Press, 1966, p. 11.

<sup>12</sup> M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 518.

daerah provinsi atau nasional, maka LQ sektor pada daerah tertentu dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>13</sup>:

$$LQ_i^R = \frac{v_i^R/v_t^R}{VI/VT} \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:

- $v_i$  = pendapatan sektor i di suatu Provinsi, Kota/Kabupaten atau daerah.
- $v_t$  = pendapatan (PDB) total suatu Provinsi, Kota/Kabupaten atau daerah.
- VI = pendapatan sektor i pada tingkat Nasional atau provinsi.
- VT = pendapatan (PDB) total Pada tingkat Nasional atau provinsi.

Untuk dapat menggunakan indeks dalam mengkaji transaksi perdagangan baik yang masuk (impor) dan keluar (ekspor) pada suatu daerah tertentu, perlu dibuat asumsi. Asumsi yang paling penting tampaknya adalah untuk mengabaikan kemungkinan adanya variasi dalam bauran industri (*industrial mix*) antar daerah. Selain itu perlu diperhatikan adalah tidak adanya industri atau eksplorasi yang terkonsentrasi aktivitasnya sangat tinggi dan penggunaannya sangat insentif akan bertentangan dengan hasil LQ pada daerah tersebut. Namun demikian untuk tahapan awal suatu pengkajian, indeks ini memberikan *proxy* yang baik mengenai batas dalam atas perpindahan (ekspor/impor) jasa dan barang suatu daerah.

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu *Pertama*, kegiatan yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Kegiatan sektor ekonomi, industri dan jasa seperti ini merupakan basis ekonomi (*basic industry*). *Kedua*, kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah bersangkutan, jenis ini dinamakan ekonomi *nonbasis* (*nonbasic industry*).

Dasar pemikiran konsep ini adalah teori *economic base* yang intinya, karena kegiatan basis ekonomi menghasilkan barang dan jasa untuk daerah maupun luar daerah bersangkutan, maka transaksi ekonomi ke luar daerah menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut, yang berdampak terhadap kenaikan konsumsi dan investasi, menaikkan pendapatan, dan membuka kesempatan kerja baru. Oleh karena itu daerah harus mengembangkan ekonomi basis yang merupakan potensi ekonomi.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Iwan Jaya Aziz, *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994), hal. 153-154.

<sup>14</sup> Arsyad Lincoln, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1999), hal. 141.

Hasil perhitungan LQ dapat digunakan untuk mengidentifikasi mana sektor basis. Semakin tinggi nilai LQ semakin tinggi keunggulan komparatif bagi daerah untuk mengembangkan sebagai potensi ekonomi. Dalam menginterpretasikan hasil analisis LQ, maka kriteria pengukuran dari nilai LQ yang dihasilkan mengacu pada kriteria yang dikemukakan Bendavid-Val pada tahun 1991 *dalam* Mudrajad Kuncoro tahun 2004 sebagai berikut: jika  $LQ^R > 1$ , berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Sedangkan bila  $LQ^R < 1$ , berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Dan jika nilai  $LQ^R = 1$ , berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Dalam kaitannya dengan pembahasan yang dilakukan, bila  $LQ^R > 1$  maka subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila  $LQ^R < 1$  maka subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.<sup>15</sup>

Namun demikian perlu dikemukakan bahwa analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Ini mengingat bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah adalah berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa dikembangkan di setiap daerah. Analisis LQ ini juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau *nonbasis*.

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hal. 227.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Perekonomian Kepulauan Riau

Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi nasional yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Puncaknya Mei 1998, rezim orde baru tumbang digantikan orde reformasi. Pada awal tahun 2000, otonomi daerah dimulai. Sejumlah perangkat undang-undang disusun sebagai landasannya. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Provinsi Kepri sebagai salah satu provinsi di Indonesia secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Provinsi ini terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepri mempunyai luas daratan sebesar 10.595,41 km<sup>2</sup> dan lautan sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup>. Provinsi Kepri hampir 98 persennya adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang membuat masyarakat di provinsi ini sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Hal ini seharusnya menggerakkan pemerintah untuk lebih aktif peran sertanya dalam memajukan sektor perikanan sebagai basis utama pertumbuhan perekonomian, mengingat sebagian besar merupakan pendapatan masyarakat Kepri.

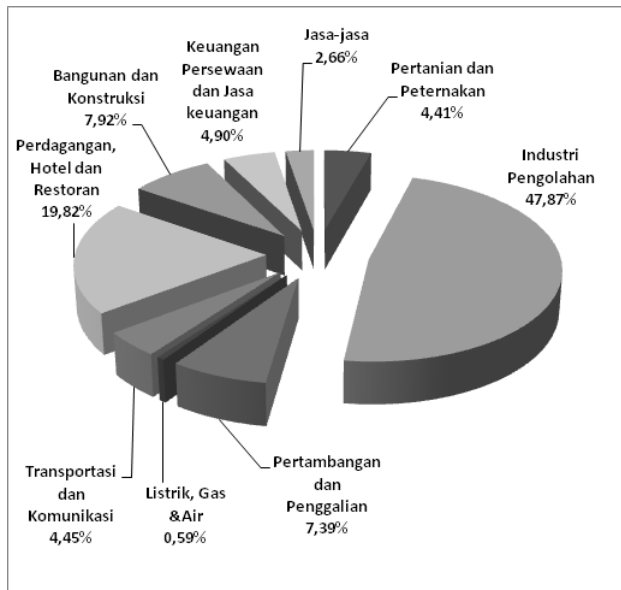
Provinsi Kepri adalah salah satu provinsi yang mengalami pemekaran wilayah (kabupaten/kota) sejak era otonomi daerah. Sejak berdiri Provinsi Kepri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Pada tahun 2008 Provinsi Kepri mengalami pemekaran wilayah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, Kabupaten Natuna dibagi menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Natuna mempunyai persentase luas daratan terbesar di Provinsi Kepri, yaitu kurang lebih sebesar 27 persen, kemudian Kabupaten Lingga 20 persen, Kabupaten Bintan 16 persen, Kota Batam 15 persen, Kabupaten Karimun 14 persen,

dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 6 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang mempunyai persentase luas daratan terkecil di Provinsi Kepri sebesar 2 persen. Beberapa pulau yang relatif besar di antaranya adalah Pulau Bintan termasuk juga di mana terdapat kedudukan ibukota Provinsi Kepri yaitu, Tanjungpinang. Kota Batam terletak di Pulau Batam, Provinsi Kepri tergolong daerah yang kurang subur karena tanahnya yang mengandung bauksit. Hal ini pula yang membuat sektor pertanian masih kurang dilirik sebagai mata pencaharian utama. Sedangkan Kabupaten Karimun memiliki struktur dan ketahanan ekonomi yang relatif baik. Hal ini terbukti selama beberapa tahun terakhir, ketika perekonomian nasional serta regional Provinsi Kepri mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun terus berakselerasi.

Mengingat pencapaian indikator makro ekonomi tidak hanya merupakan kinerja perekonomian nasional saja, namun juga merupakan kinerja perekonomian bersama antara daerah pemerintah provinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota, masyarakat, serta pihak swasta. Hal ini terkait dengan paradigma baru pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya peningkatan kesejahteraan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Bila melihat secara umum struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selalu didominasi kelompok tersier, kemudian primer, dan terakhir sekunder. Dengan melihat proporsi atau distribusi PDRB Provinsi Kepri sektor industri pengolahan dengan perhitungan harga berlaku dengan migas sebesar 47,87 persen, sedangkan menurut harga konstan dan tanpa migas mencapai menunjukkan 52,27 persen. Menyusul sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,82 persen dengan migas dan 24,81 persen tanpa migas. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Provinsi Kepri proporsi pertumbuhannya masih didominasi sektor industri pengolahan, sedangkan sektor pertanian dan peternakan yang juga termasuk potensi perikanan laut masih kecil sekitar 4 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

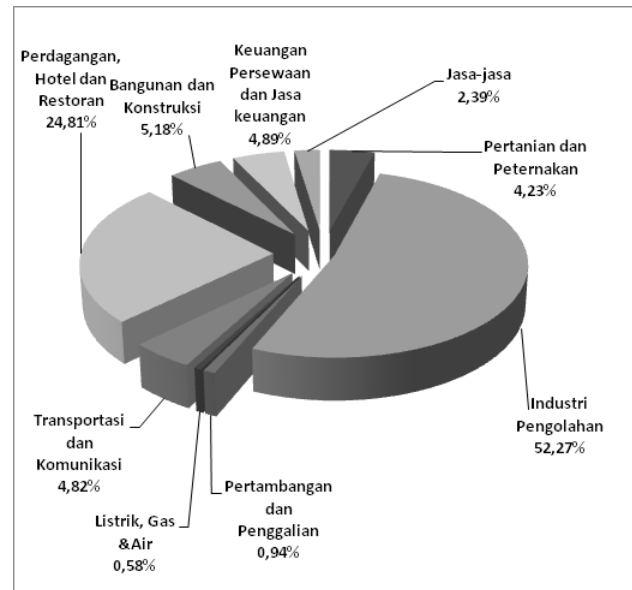


Sumber: Kepulauan Riau dalam angka 2013, diolah.

**Gambar 1.** Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Riau ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2012

Guna mendalami permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik secara agregat dan menurut lapangan usaha selalu menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan. Hal ini sangat penting mengingat dengan menggunakan PDRB harga konstan akan dapat memberikan secara riil perubahan produksi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara riil suatu daerah akan diperoleh dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan sebagai indikator perekonomian suatu daerah atau wilayah.

Dalam periode tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Kepri berfluktuasi, walaupun tahun 2009 mengalami perlambatan, namun kembali terjadi percepatan pertumbuhan pada tahun 2010 menjadi 7,19 persen dengan migas dan 7,51 persen tanpa migas dan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,66 persen dengan migas dan 6,92 persen tanpa migas pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan



Sumber: Kepulauan Riau dalam angka 2013, diolah.

**Gambar 2.** Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Riau ADHK tanpa migas menurut Lapangan Usaha Tahun 2012

mencapai 8,21 persen dengan migas dan 8,26 persen tanpa migas, artinya bahwa secara umum akserelasi pertumbuhan perekonomian *nonmigas* Kepri lebih tinggi.

Meski tercatat meningkat dari tahun sebelumnya, tumbuhnya ekonomi Kepri ini membangkitkan neraca perdagangan luar negeri Kepri yang mengalami surplus di tahun 2012, setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami defisit. Meskipun demikian hambatan tentu selalu ada karena ekonomi Kepri bersandar sepenuhnya pada industri pengolahan yang berbasis ekspor di mana tidak terlepas dari kondisi eksternal. Lebih jelasnya perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Perencanaan pembangunan tentunya membutuhkan berbagai data dalam rangka menentukan dan mengarahkan pembangunan, agar sasaran dapat dicapai. Salah satu data yang diperlukan adalah PDRB guna mengetahui potensi dan basis perekonomian

**Tabel 1.** Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2012

Uraian	2010		2011		2012	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
PDRB ADHK (2000=100) (milyar Rp)	41.076	39.350	43.810	42.079	47.405	43.810
PDRB ADHB (Milyar Rp)	71.615	66.505	80.243	75.007	91.717	85.923
PDRB/Kapita ADHK (000 Rp)	24.462	23.434	24.825	23.840	25.659	24.264
PDRB/Kapita ADHB (000 Rp)	42.649	39.606	45.469	42.503	49.644	46.509
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	7,19	7,51	6,66	6,92	8,21	8,26

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2013

Keterangan: ADHK: Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000).

ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku.

**Tabel 2.** Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tabel Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012**)
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.727.168,11	1.799.712,14	1.870.861,24	1.924.743,94
2.	Petambangan dan Penggalian	366.629,55	382.153,41	402.675,48	429.072,44
3.	Industri Pengolahan	19.506.700,58	20.876.469,60	22.239.552,91	23.809.755,16
4.	Listrik, Gas, dan Air	201.233,64	217.815,75	248.219,67	265.718,90
5.	Bangunan	1.730.856,12	1.931.026,73	2.122.242,93	2.361.330,89
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8.628.112,62	9.452.702,39	10.115.037,31	1.1245.416,66
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1.719.254,03	1.829.326,86	2.010.923,65	2.194.868,69
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.829.798,96	1.921.025,28	2.059.518,84	2.227.826,32
9.	Jasa-Jasa	891.028,23	939.528,10	1.009.980,13	1.089.759,31
	PDRB Tanpa Migas	36.600.781,84	39.349.760,26	42.079.012,16	45.548.492,31

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2013.

Keterangan: \* Angka Sementara.

\*\* Angka Sangat Sementara.

dalam rangka menerapkan strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan sekaligus mengevaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Salah satu indikator penting dari PDRB tersebut adalah mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi pada suatu periode tertentu dalam suatu wilayah.

Dalam pemanfaatan data analisis, PDRB atas harga konstan tahun 2000 digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi baik secara agregat dan menurut lapangan usaha. Adapun tujuan yang ingin dicapai setiap daerah adalah tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga daerah tersebut dengan cepat dan mudah akan mudah dan tepat dalam pelaksanaan tujuan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan. Bila melihat PDRB Provinsi Kepri atas harga konstan 2000 pada tahun 2009 tanpa migas sebesar Rp36,60 triliun dan mengalami kenaikan sekitar 6,9 persen atau sebesar Rp39,349 triliun dan mencapai Rp42,07 triliun pada tahun 2011 dan sedangkan angka sementara pada tahun 2012 sebesar Rp45,54 triliun. Sedangkan menurut lapangan usaha, sektor industri pengolahan memiliki PDRB tertinggi di mana tahun 2009 mencapai Rp19,50 triliun, dan angka sementara untuk tahun 2012 mencapai Rp23,809 triliun. Sebagai cerminan keseluruhan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, PDRB<sup>16</sup> tentu memegang peran penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pada tahun 2012, total nilai tambah yang tercipta di Kepri mencapai Rp 45,548 triliun. Angka ini tergolong cukup tinggi untuk ukuran provinsi kecil (Tabel 2).

Sedangkan bila dilihat dari sisi lapangan usaha, banyak sektor-sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hanya sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan serta perdagangan, hotel dan restoran mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan masing-masing 3,95 persen, 6,53 persen, 9,90 persen, dan 7,01 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu tumbuh 8,24 persen pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi 13,96 persen pada tahun 2011, di mana terjadi penambahan pelanggan listrik prabayar, penambahan jumlah pelanggan gas kota (PGN Batam) dan adanya kenaikan tarif listrik air bersih/minum.

Untuk sektor lainnya juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan migas tumbuh 1,52 persen, sedangkan di tahun sebelumnya tumbuh 1,13 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 9,93 persen, di mana tahun sebelumnya tumbuh 6,40 persen. Sektor keuangan, penyewaan dan jasa perusahaan tumbuh 4,99 persen pada tahun 2010 dan terus tumbuh pada tahun 2011 menjadi 7,21 persen. Dan terakhir sektor jasa yang mengalami pertumbuhan 5,44 persen pada tahun 2010 terus meningkat pertumbuhannya pada tahun 2011 menjadi 7,50 persen. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 7,19 persen, dan pada tahun 2011 sebesar 6,67 persen. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi pada tahun 2011 adalah listrik, gas, dan air bersih 13,96 persen, pengangkutan dan komunikasi 9,93

<sup>16</sup> Statistik Daerah Provinsi Kepri, 2013, hal. 35-36.

persen, dan bangunan 9,90 persen. Sementara sektor industri pengolahan pertumbuhannya melambat, yaitu dari 7,02 persen pada tahun 2010, menjadi 6,53 persen pada tahun 2011<sup>17</sup> (lihat Tabel 3).

**Tabel 3.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)
1.	Pertanian , Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,50	4,20	4,29
2.	Petambangan dan Penggalian dengan migas	1,10	1,13	1,52
	Petambangan dan Penggalian tanpa migas	3,31	4,23	4,29
3.	Industri Pengolahan	2,40	7,02	6,53
4.	Listrik, Gas, dan Air	1,98	8,24	13,96
5.	Bangunan	13,36	11,56	9,90
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	3,84	9,56	7,01
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,67	6,40	9,99
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5,50	4,99	7,21
9.	Jasa-Jasa	8,44	5,44	7,47
	PDRB Dengan Migas	3,52	7,19	6,67
	PDRB Tanpa Migas	3,66	7,51	6,93

Sumber: BPS PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 2013.

Keterangan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 1. Kondisi Ekonomi Kota Batam

Dengan adanya perubahan secara nasional perhitungan tahun dasar PDRB tahun 1993 ke tahun dasar 2000 maka laju pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2010 mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Kota Batam

mencapai 7,20 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,77 persen. Sedangkan bila kita melihat distribusi masing-masing sektor pendapatan regional pada tahun 2011 masih sangat dominan berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 57,85 persen.

Sedangkan sektor lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 27,54 persen; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 5,58 persen. Pendapatan regional per kapita berdasarkan harga berlaku (*current price*), pada tahun 2011 mencapai Rp39,096 juta dan berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp23,157 juta. Angka yang disajikan merupakan angka perbaikan perhitungan PDRB tahun 2010 dan angka sementara perhitungan PRDB tahun 2011 (tanda\*) (Tabel 4).

Kota Batam sejak awal berdirinya sudah merupakan motor penggerak bagi Provinsi Kepulauan Riau pada periode tahun 2007-2011 mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Bila melihat pada tahun 2007, Kota Batam tumbuh sebesar 7,52 persen. Namun pada tahun 2009 yang pada saat itu adanya krisis ekonomi global, berdampak ke kawasan Batam sehingga pertumbuhan turun menjadi 4,86 persen saja. Namun pada tahun selanjutnya kembali terjadi percepatan pertumbuhan pada tahun 2010 di mana pertumbuhan mencapai 7,77 persen. Sedangkan pada tahun 2011, dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa juga dirasakan, sehingga Batam hanya tumbuh sekitar 7,20 persen.

Bila melihat dari pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada Kota Batam, tiap sektor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Bila melihat dari sektor pertanian untuk tahun 2011, Batam mencapai pertumbuhan 7,01 persen, kenaikan

**Tabel 4.** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam Tahun 2009-2011\*\*

(Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	322.240,39	332.745,68	356.079,36
2.	Petambangan dan Penggalian	38.238,10	38.739,78	39.137,46
3.	Industri Pengolahan	16.129.662,84	17.324.054,57	18.285.883,65
4.	Listrik, Gas, dan Air	173.774,18	182.140,89	200.787,68
5.	Bangunan	682.024,72	790.775,61	872.755,32
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6.394.181,34	6.970.221,61	7.750.339,04
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	808.192,93	856.644,77	922.972,50
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.196.300,23	1.259.686,01	1.337.460,94
9.	Jasa-Jasa	335.232,20	352.268,30	365.532,68
	PDRB	26.079.846,95	28.107.277,22	30.130.948,64

Sumber: Batam Dalam Angka BPS, 2013.

<sup>17</sup> Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, 2012, hal. 47.

ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 2,93 persen pada tahun 2009 dan 3,26 persen tahun 2010. Namun demikian untuk sektor pertambangan pertumbuhannya hanya sekitar 1,03 persen untuk tahun 2011, dan merupakan daerah yang pertumbuhan terkecil dibandingkan daerah-daerah lain di lingkup Provinsi Kepri.

Pada sektor lapangan usaha listrik, gas dan air bersih, Kota Batam memiliki pertumbuhan yang besar dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 10,24 persen pada tahun 2011 dan nilainya masih di atas pertumbuhan provinsi. Hal ini merupakan dampak dari semakin tingginya permintaan akan tenaga listrik dan adanya pembangunan pembangkit listrik untuk industri-industri. Demikian pula untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kota Batam memiliki pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2011 di mana mencapai 11,19 persen yang mana nilainya di atas pertumbuhan provinsi. Namun demikian untuk lapangan usaha bangunan, mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2009 mencapai 22,46 persen, pada tahun 2010 sebesar 15,95 persen, dan pada tahun 2011 hanya sebesar 10,37 persen. Penurunan ini akibat dampak dari krisis ekonomi global, sehingga banyak yang masih menunda realisasi investasi. Walaupun adanya, banyak yang memanfaatkan bangunan lama yang telah tersedia pada kawasan-kawasan berikut.

Secara total pertumbuhan Kota Batam pertumbuhan ekonominya mencapai 7,20 persen yang sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, untuk tahun 2011 Kota Batam memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepri, di mana terlihat dari kontribusinya mencapai 68,92 persen. Lebih rinci dapat dibaca dalam Tabel 5.

**Tabel 5.** Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Batam menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)
1.	Pertanian , Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,93	3,26	7,01
2.	Petambangan dan Penggalian	1,21	1,31	1,03
3.	Industri Pengolahan	3,73	7,40	5,55
4.	Listrik, Gas, dan Air	1,71	4,81	10,24
5.	Bangunan	22,46	15,95	10,37
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,05	9,01	11,19
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,63	6,00	7,74
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,85	5,30	6,17
9.	Jasa-Jasa	5,63	5,08	3,77
	PDRB Tanpa Migas	4,86	7,77	7,20

Sumber: BPS PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 2013.

Keterangan: \* Angka Sementara/Preliminary Figure.

## 2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Karimun

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator PDRB. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 mampu mencapai Rp4.813 miliar dan atas dasar harga konstan tahun 2000 nilai PDRB tahun yang sama sebesar Rp2.185 miliar.

Dalam menilai PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan data harga tahun 2011, sedangkan untuk menilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 data yang digunakan adalah harga tahun 2000. Dengan menggunakan data harga pada tahun dasar diharapkan bisa memantau pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga yang secara umum dikenal dengan istilah inflasi.

Pada tahun 2011 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian Kabupaten Karimun adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 25,91 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,45 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,87 persen; dan sektor industri pengolahan sebesar 9,23 persen.

Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun, dapat dilihat dengan menggunakan data indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Karimun mampu tumbuh sebesar 7,05 persen yang didukung oleh pertumbuhan di sektor bangunan, keuangan dan persewaan, industri pengolahan dan jasa-jasa.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Karimun merupakan salah satu wilayah yang memperoleh kekhususan. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai potensi yang ada. Kabupaten Karimun pada tahun-tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2007 kabupaten ini tumbuh 5,90 persen, dan terus tumbuh mencapai 7,05 persen pada tahun 2011. Bila melihat pertumbuhan pada setiap lapangan usaha, untuk sektor pertumbuhan pertanian di Kabupaten Karimun dari tahun 2009-2011 hanya sekitar 4,59 persen, 4,34 persen dan 4,29 persen. Namun untuk sektor pertambangan dan galian, mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2011 sebesar 6,39 persen dibandingkan dengan tahun 2009 hanya 1,69 persen. Demikian pula dengan industri pengolahannya, Kabupaten Karimun mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2009 sebesar 7,37 persen, tahun 2010 7,56 persen dan pada tahun 2011 mencapai 11,31 persen dan nilai laju pertumbuhan ekonominya masih lebih tinggi dibandingkan

**Tabel 6.** Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, 2009-2011

(Juta Rp)				
No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)
1.	Pertanian , Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	608.263,30	634.658,08	661.862,32
2.	Petambangan dan Penggalian	84.790,62	88.022,45	93.648,97
3.	Industri Pengolahan	226.196,29	243.296,73	270.813,59
4.	Listrik, Gas, dan Air	5.423,84	5.809,25	6.225,17
5.	Bangunan	136.375,54	157.350,09	175.524,03
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	495.003,28	530.254,38	571.372,22
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	198.257,65	210.232,83	223.134,37
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	64.620,76	68.688,50	73.411,77
9.	Jasa-Jasa	96.737,75	103.119,47	109.292,16
	PDRB	1.915.669,03	2.041.431,79	2.185.284,61

Sumber: Karimun dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun BPS, 2012.

pertumbuhan provinsi. Hal ini dikarenakan adanya industri pengolahan baru yang bergerak di bidang galangan kapal. Sedangkan untuk sektor bangunan Kabupaten yang sebelumnya pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 15,55 persen dan 15,38 persen pada tahun 2010 pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 11,55 persen. Secara total pertumbuhan Kabupaten Karimun pada tahun 2011 mencapai 7,05 persen. Walaupun demikian kontribusi dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepri hanya sebesar di atas 6,30 persen. Lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel 7.

**Tabel 7.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011*)
1.	Pertanian , Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	4,59	4,34	4,29
2.	Petambangan dan Penggalian	1,69	3,81	6,39
3.	Industri Pengolahan	7,37	7,56	11,31
4.	Listrik, Gas, dan Air	5,27	7,11	7,16
5.	Bangunan	15,35	15,38	11,55
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,11	7,12	7,75
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,29	6,04	6,14
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,04	6,29	6,88
9.	Jasa-Jasa	7,23	6,60	5,99
	PDRB Tanpa Migas	6,30	6,56	7,05

Sumber: BPS PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 2013.

Keterangan: \* Angka Sementara/Preliminary Figure.

### 3. Potensi Daerah Penentuan Sektor Basis

Penentuan sektor unggulan regional dan daerah pada tingkat kota atau kabupaten merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Langkah menuju efisiensi dapat ditempuh dengan

fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap daerah lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang diharapkan menjadi basis adalah metode LQ yaitu di Kota Batam dan Kabupaten Karimun dalam penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Kota Batam

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan Model LQ bahwa sektor yang menjadi basis di Kota Batam dan Kabupaten Karimun tidak memiliki kesamaan. Untuk Kota Batam sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, konstruksi dan bangunan, transportasi, keuangan, jasa keuangan dan jasa-jasa bukan merupakan basis ekonomi (*nonbasis*). Sedangkan yang menjadi basis dan merupakan potensi ekonomi di Kota Batam adalah sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Adapun nilai yang diperoleh dalam pengolahan data-data ekonomi tersebut sebagai berikut:

Pada tahun 2009, sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan bukan merupakan sektor basis (sektor) ekonomi bagi Kota Batam, dari nilai LQ-nya sebesar 0,26 hanya berada pada urutan ke VIII, demikian pula pada tahun 2010 dan 2011 sebagai sektor *nonbasis* akan sulit dikembangkan sebagai potensi yang harus dikembangkan di mana nilainya hanya 0,24 dan 0,26. Sektor ini akan sulit karena lahan pertanian dan perkebunan tidak cukup subur untuk mengembangkan lapangan usaha ini, kecuali untuk perikanan laut perlu digali oleh pemerintah Kota Batam.

Demikian pula halnya pada sektor pertambangan tidak merupakan basis ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Kota Batam. Hal ini terlihat dari perhitungan nilai LQ di mana pada tahun 2009

hanya sebesar 0,14 yang merupakan yang tidak berpotensi. Demikian pula pada tahun 2010 dan 2011 nilai LQ sama yaitu 0,13 yang berada pada urutan ke IX sebagai prioritas potensi ekonomi Kota Batam.

Sedangkan pada sektor industri pengolahan pada tahun 2009-2011, sektor ini berpotensi untuk dikembangkan karena nilai LQ-nya mencapai 1,16; 1,08; dan 1,14. Namun untuk Kota Batam ternyata pada akhir-akhir ini kurang berkembang untuk dapat dijadikan sektor basis akibat berbagai hal, salah satunya pengembangan kawasan industri akibat semakin terbatasnya lahan serta permasalahan dualisme kebijakan daerah antar badan pengelola dan pemerintah kota yang kurang harmonis. Namun demikian Batam masih merupakan penyumbang terbesar dari sektor ini dari daerah di Provinsi Kepri.

Untuk sektor listrik, gas dan air bersih yang merupakan kebutuhan primer masyarakat dan kegiatan industri pengolahan di Kota Batam merupakan basis ekonomi dan berpotensi dikembangkan, hal ini terlihat dari nilai LQ dari tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing mencapai 1,21; 1,09; dan 1,12. Selain itu hal ini juga merupakan indikator bahwa pada kurun waktu tersebut tidak terjadi perubahan permintaan. Hal ini merupakan kebutuhan primer di mana tidak ada dampak yang signifikan terhadap konsumsi masyarakat dan industri secara keseluruhan.

Namun pada sektor konstruksi dan bangunan untuk Kota Batam bukan merupakan basis sebagai potensi ekonomi yang cukup berkembang. Hal ini terlihat dari nilai LQ yang > 1 sebesar 0,55; 0,53; dan 0,57 masing-masing pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi Eropa dan global yang terjadi pada tahun 2008 sehingga banyak investor yang menunda untuk merealisasikan, selain itu Kota Batam mengalami kesulitan dalam pengadaan lahan untuk memperluas kawasan di Bareleng karena belum ada regulasi yang jelas untuk kawasan tersebut.

Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, merupakan basis potensi ekonomi yang dapat dikembangkan Kota Batam sebagai pendapatan daerah. Walaupun dilihat dari nilai LQ yang mengalami penurunan pada tahun 2011 di mana nilai LQ nya 0,96 padahal tahun 2009 dan tahun 2011 masing-masing 1,04 dan 1,07. Namun demikian potensi ekonomi pada sektor ini harus terus dikembangkan agar dapat menjadi andalan dalam memperoleh pendapatan bagi daerah.

Selain itu sektor transportasi dan komunikasi tidak dapat menjadi basis yang berpotensi untuk dikembangkan, karena dari perhitungan nilai LQ pada tahun 2009-2011 hanya 0,65; 0,611; dan 0,64 akibat keterbatasan infrastruktur dan masalah geografi

Batam yang hanya merupakan sebuah pulau. Demikian pula pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, bukan merupakan basis sebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Namun untuk jangka panjang sektor ini dapat dijadikan potensi ekonomi sejalan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Mengingat Batam biasa dijadikan kawasan pengembangan jasa-jasa penyewaan untuk pelabuhan bagi kapal-kapal kawasan ASEAN.

Sedangkan sektor jasa-jasa merupakan *nonbasis* dengan melihat nilai LQ yang sangat kecil di mana pada kurun waktu tahun 2009, 2010, dan 2011 di mana nilai LQ nya masing-masing hanya mencapai 0,52; 0,48; dan 0,50. Hal ini bisa jadi dikarenakan belum begitu besar karena belum banyak masyarakat Kota Batam yang memanfaatkan jasa dalam kegiatan ekonomi seperti jasa perbankan, keuangan, serta jasa-jasa lainnya. Kegiatan sektor ini akan terus meningkat sejalan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian Kota Batam.

Berdasarkan *ranking* untuk pengembangan sektor atas dasar nilai yang diperoleh dari LQ yang memiliki potensi ekonomi, maka sektor pertama yang seharusnya mendapat prioritas pengembangan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam adalah sektor listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian seharusnya pemerintah kota berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan peluang untuk mengembangkan usaha di sektor basis ini terutama usaha yang berskala kecil dan menengah, serta perlindungan yang sewajarnya, kemudahan-kemudahan aturan, mencari peluang pasar, diversifikasi produk, kredit-kredit bersyarat lunak. Selain itu ketersediaan lahan untuk menggenjot sektor bangunan dan konstruksi dan sinkronisasi kebijakan antar Badan Pengelola dan pemerintah kota yang terus menjadi kendala dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi lainnya. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah kebijakan perencanaan pembangunan untuk pengembangan sektor basis harus lebih besar agar investasi dapat kembali masuk agar terealisasi.

Khusus mengenai sektor industri beserta sub-subsektor perikanan laut di dalamnya perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat fluktuasi produksi dan pemasarannya sektor ini sangat tinggi akibat berbagai permasalahan keamanan dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Seharusnya potensi alam kelautan yang berlimpah harus mendapat prioritas dari pemerintah untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Ditambah lagi sektor ini mampu menyerap sebagian angkatan kerja yang ada di kawasan perbatasan antar pulau

**Tabel 8.** Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotion*) per Sektor Potensi dan Basis Ekonomi Kota Batam terhadap Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Pada Tahun 2009- 2011

No.	Lapangan usaha	Kota Batam								
		Nilai LQ			Basis-Nonbasis			Rank		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	0,26	0,24	0,26	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	VIII	VIII	VIII
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,13	0,13	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	IX	IX	IX
3.	Industri Pengolahan	<b>1,16</b>	<b>1,08</b>	<b>1,14</b>	<b>Basis</b>	<b>Basis</b>	<b>Basis</b>	II	II	I
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	<b>1,21</b>	<b>1,09</b>	<b>1,12</b>	<b>Basis</b>	<b>Basis</b>	<b>Basis</b>	I	I	II
5.	Bangunan/Konstruksi	0,55	0,53	0,57	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	VI	VI	VI
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	<b>1,04</b>	0,96	<b>1,07</b>	<b>Basis</b>	Nonbasis	<b>Basis</b>	III	III	III
7.	Transportasi dan Komunikasi	0,65	0,611	0,64	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	V	V	V
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,91	0,85	0,90	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	IV	IV	IV
9.	Jasa-Jasa	0,52	0,48	0,50	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	VI	VII	VII

Sumber: Hasil pengolahan.

di Provinsi Kepri. Pemerintah Kota Batam tentunya memahami, bahwa sebagian besar penduduknya adalah pendatang yang masih sangat tergantung pada sektor-sektor industri. Namun tentunya perlu dipikirkan bagaimana lapangan usaha tersebut dapat dikembangkan menjadi industri modern berteknologi tinggi, di mana selama ini Batam terutama akhir-akhir ini bergerak dalam *sunset industry*<sup>18</sup> dan hanya industri merakit yang rendah nilai tambahnya.

Tentunya berbagai upaya dalam menarik investasi pengembangan sektor ini dapat memanfaatkan berbagai sumber daya. Tentunya investasi tidak hanya pengembangan perangkat kerasnya saja seperti infrastruktur, mesin-mesin berteknologi tinggi, namun perlu investasi dengan menciptakan kondisi yang kondusif terkait masalah kepastian usaha industri dari sisi regulasi, keamanan, dan buruh. Tentunya komitmen ini tidak terlepas dari komitmen seluruh penyelenggara pemerintah pusat daerah dan Badan Pengelola Otorita Batam. Hasil pengolahan data dan analisis mengenai potensi basis ekonomi batam dapat dilihat pada Tabel 8.

#### b. Kabupaten Karimun

Pengembangan Kabupaten Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Karimun relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan Batam dan Bintan dalam kesiapan menarik investasi, terutama investasi asing. Relatif masih kurangnya infrastruktur di wilayah ini pada satu sisi menyebabkan Karimun masih belum

terlalu memberikan daya tarik bagi investor besar yang ingin menanamkan investasinya di wilayah tersebut. Namun pada sisi lain, Karimun belum menghadapi persoalan peningkatan harga sewa/ jual lahan dan biaya hidup yang cukup nyata seperti yang dihadapi oleh Batam. Dengan belum banyaknya investasi yang masuk ke wilayah ini dan harga lahan yang relatif lebih kompetitif serta posisi geografisnya yang spesifik, maka Karimun sangat memungkinkan untuk dapat dipacu pengembangannya. Namun untuk mewujudkan potensi ini, perlu dilakukan penataan ruang dengan pembagian zona peruntukkan yang tepat sesuai dengan potensi sumber daya alamnya.

Dengan memperhatikan tabel hasil pengolahan, diketahui bahwa Kabupaten Karimun saat ini memiliki 6 sektor basis sektor tersebut yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa. Sektor pertanian memiliki kemampuan yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu penyebabnya adalah subsektor perikanan di Karimun memiliki produksi terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau Nilai LQ masing-masing untuk tahun 2009, 2010 dan 2011 adalah 6,7; 6,34; dan 6,81 artinya bahwa proporsi penciptaan nilai tambah di sektor pertanian di Kabupaten Karimun rata-rata 6 kali lebih besar daripada proporsi penciptaan nilai tambah sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor ini masih merupakan basis dan potensi yang paling besar untuk Kabupaten Karimun di mana menempati rangking ke 1. Hal ini bisa jadi mengingatkan kabupaten ini masih memiliki lahan yang cukup luas untuk area perkebunan dan pertanian dan sudah barang tentu sektor perikanan yang memiliki potensi yang sangat banyak untuk dijadikan potensi ekonomi ke depan.

<sup>18</sup> *Sunset Industry* adalah cabang industri yang perannya kecil dalam industri manufaktur dan tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata industri lainnya kondisi ini ada karena lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi (industri yang masih bertipe "tukang jahit" dan "tukang rakit"), dan rendahnya kualitas SDM.

Selain itu sektor pertambangan dan penggalian menempati urutan ke 2 untuk dijadikan potensi ekonomi, di mana sektor ini memiliki nilai LQ pada tahun 2009-2011 masing-masing sebesar 4,41; 4,14; dan 4,47. Seharusnya Kabupaten Karimun dapat meningkatkan dari sektor ini, karena memiliki kandungan mineral, terutama Kuarsa. Demikian pula sektor transportasi dan komunikasi bisa dijadikan potensi dan basis ekonomi, walaupun untuk Kabupaten Karimun masih perlu dukungan infrastruktur.

Demikian pula untuk sektor jasa-jasa yang cukup berkembang di mana nilai LQ untuk lapangan usaha ini dari tahun 2009-2011 masing-masing nilainya 2,07; turun 1,97; dan naik lagi menjadi 2,08. Sementara sektor yang termasuk ke dalam sektor *nonbasis* selama periode tahun 2009-2011 adalah sektor industri pengolahan masing-masing 0,22; 0,20; dan 0,23. Padahal sektor ini harusnya menjadi perhatian mengingat listrik, air, dan sektor keuangan. Meskipun sektor sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun, sektor sektor harus dikembangkan untuk menjadi sektor basis baru ditunjang dengan adanya sektor basis yang ada.

Kabupaten Karimun memiliki wilayah darat yang hampir sama luasnya, namun Kabupaten Karimun memiliki wilayah laut yang hampir dua kali lebih luas. Dengan kondisi wilayah yang didominasi oleh perairan di 4 wilayah kepulauan Riau ini, maka peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wilayahnya sangatlah spesifik bila dibandingkan dengan daerah yang dominasinya wilayah darat. Ke depan tentunya perencanaan tetap menggali potensi alam yang masih besar, terutama hasil dari sektor perikanan yang selanjutnya dikembangkan menjadi industri pengolahan hasil perikanan. Diharapkan

sektor-sektor ini menjadi penghela sektor dan lapangan usaha lainnya. Hasil pengolahan tersebut secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 9.

### c. Potensi Investasi

Sesuai dengan tujuan analisis ini adalah mengetahui potensi-potensi ekonomi selain alat perencanaan pembangunan daerah juga berfungsi sebagai mendeteksi sektor apa saja yang kemungkinan besar dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, sektor-sektor yang potensial atau strategis akan mendapat prioritas utama dalam penyusunan perencanaan daerah kemana investasi diarahkan dan mengarahkan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan sektor basis. Sebab, dengan berkembangnya sektor basis, akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sektor unggulan guna menarik investasi daerah Batam dan Karimun. Di samping itu, sektor basis diharapkan akan mampu membuka peluang-peluang dan usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah lainnya.

Dari hasil pengolahan data tersebut pengeluaran pemerintah seharusnya paling banyak pada sektor yang berkaitan dengan sektor basis. Selain itu untuk sektor *nonbasis* pemerintah daerah harus meningkatkan dan mendorong agar sektor atau lapangan usaha juga dapat menjadi potensi. Untuk Kota Batam misalnya, walaupun proporsi pertumbuhan terhadap Provinsi Kepri masih paling besar sumbangannya, namun hingga tahun 2011 hanya sektor industri pengolahan, listrik, gas air minum, dan perdagangan hotel restoran saja yang menjadi andalan perekonomian Batam. Seharusnya perekonomian Batam dapat tumbuh dua atau tiga kali lipat dari saat ini, jika semua potensi yang ada benar-benar diberdayakan dan sejumlah faktor penghambat dihilangkan.

Tentunya sangat sulit bagi Batam dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi bila masih

**Tabel 9.** Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotion*) per Sektor Potensi dan Basis Ekonomi Kabupaten Karimun terhadap Provinsi Kepulauan Riau atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2009- 2011

No.	Lapangan usaha	Kabupaten Karimun								
		Nilai LQ			Basis-Nonbasis			Rank		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	6,70	6,34	6,81	Basis	Basis	Basis	I	I	I
2.	Pertambangan dan Penggalian	<b>4,41</b>	<b>4,14</b>	<b>4,47</b>	Basis	Basis	Basis	II	II	II
3.	Industri Pengolahan	0,22	0,20	0,23	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	IX	IX	IX
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,51	0,47	0,48	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	VIII	VIII	VIII
5.	Bangunan/Konstruksi	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>	<b>1,59</b>	Basis	Basis	Basis	V	V	V
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	<b>1,09</b>	<b>1,00</b>	<b>1,08</b>	Basis	Basis	Basis	VI	VI	VI
7.	Transportasi dan Komunikasi	<b>2,20</b>	<b>2,06</b>	<b>2,13</b>	Basis	Basis	Basis	III	III	III
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,67	0,64	0,68	Nonbasis	Nonbasis	Nonbasis	VII	VII	VII
9.	Jasa-Jasa	<b>2,07</b>	<b>1,97</b>	<b>2,08</b>	Basis	Nonbasis	Basis	IV	IV	IV

Sumber: Hasil pengolahan.

banyak kendala yang dihadapi investor di lapangan. Beberapa hal yang dikeluhkan sejumlah pihak terkait investasi di Batam antara lain menyangkut infrastruktur yang buruk serta kerangka kebijakan yang terkesan tumpang tindih. Kendala dalam investasi di daerah, umumnya dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya faktor geografis, potensi daerah, ketersediaan SDM, regulasi, dan infrastruktur. Batam yang selalu digambarkan memiliki kompleksitas faktor-faktor di atas dalam menguatkan iklim investasi, namun tidak lepas dari munculnya permasalahan-permasalahan lain seperti persoalan buruh, keamanan dan ketertiban hukum maupun produk hukum seperti munculnya perda-perda yang tidak pro investasi atau masih panjangnya regulasi perizinan. Demikian pula dengan masalah lahan dan pertanahan di mana ada konflik kewenangan antarbadan pengelola yang memperoleh hak dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Batam setelah otonomi daerah. Urusan pertanahan yang merupakan urusan wajib pada kenyataannya masih dilaksanakan oleh BP Batam.<sup>19</sup>

Dari beberapa negara-negara yang berkontribusi besar dalam menanamkan modal di kawasan ekonomi Batam, antara lain adalah Singapura, Jepang, Malaysia, dan Australia lebih banyak bergerak sektor industri. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor perekonomian adalah industri pengolahan. Dengan demikian Batam merupakan kawasan strategis untuk menarik investasi.

Selain pengembangan di sektor industri yang juga sangat memiliki prospek yang bagus adalah potensi di sektor pariwisata. Pengembangan wilayah pariwisata Kota Batam diarahkan untuk pengembangan wisata konferensi. Lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan Singapura dan berada di jalur lintasan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, yang membawa hampir separuh muatan kargo dunia. Kondisi itu justru belum dimanfaatkan secara maksimal oleh otoritas FTZ BBK. Padahal jika pelabuhan di Batam mampu mengelola seperempat saja muatan kargo yang melintasi Selat Malaka, pemasukan pemerintah bisa mencapai triliunan rupiah yang diperoleh dari retribusi sandar kapal, lepas jangkar, dan lainnya. Potensi ekonomi yang dimiliki belum mampu dimanfaatkan secara optimal, yang mengakibatkan masih tertinggalnya Batam dibanding kawasan perdagangan bebas di negara tetangga. Seperti jasa dalam hal pelayanan bongkar muat peti kemas. Kemampuan pelayanan terminal peti kemas. Dengan status kawasan perdagangan

bebas (*free trade zone*), tingkat investasi di Batam terus meningkat. Fasilitas pendukung juga harus terus mengalami perbaikan.

Pengembangan Kabupaten Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan Batam dan Bintan dalam kesiapan menarik investasi, terutama investasi asing. Relatif masih kurangnya infrastruktur di wilayah ini pada satu sisi menyebabkan Karimun masih belum terlalu memberikan daya tarik bagi investor besar yang ingin menanamkan investasinya di wilayah tersebut. Namun pada sisi lain, Karimun belum menghadapi persoalan peningkatan harga sewa/jual lahan dan biaya hidup yang cukup nyata seperti yang dihadapi oleh Batam.

Dari hasil analisis potensi, sebenarnya Karimun memiliki banyak sektor potensial yang menjadi basis. Potensi yang paling besar yang dapat diarahkan untuk menarik investasi adalah pertanian, peternakan, kehutanan, terutama perikanan dan sektor pertambangan yang memiliki sumber-sumber yang belum digarap karena berbagai kendala, terutama infrastruktur. Dengan belum banyaknya investasi yang masuk ke wilayah ini serta harga lahan yang relatif lebih kompetitif serta posisi geografisnya yang spesifik, maka Karimun sangat memungkinkan untuk dapat dipacu pengembangannya. Namun untuk mewujudkan potensi ini, perlu dilakukan penataan ruang dengan pembagian zona peruntukan yang tepat sesuai dengan potensi sumber daya alamnya. Potensi wisata juga merupakan sektor yang belum dikembangkan, selain sektor jasa untuk kawasan labuh jangkar bagi kapal-kapal yang menantikan jadwal masuk ke *port of Singapore*. Peluang atau potensi tersebut tentunya dibutuhkan sarana infrastruktur pelabuhan yang memiliki standar layaknya sebuah kawasan. Selain itu persoalan yang dihadapi lainnya adalah kelembagaan yang masih berusia dini dan memerlukan berbagai pengembangan dan peningkatan untuk dapat mengembangkan Kawasan Karimun sesuai dengan potensinya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dari hasil analisis struktur pertumbuhan ekonomi dalam studi kasus Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau secara umum perekonomiannya masih ditopang dari sektor industri pengolahan. Dalam struktur pertumbuhan ekonomi, Batam masih memberikan kontribusi yang paling besar diantara kabupaten di Provinsi Kepri. Akibat berbagai permasalahan beberapa tahun

<sup>19</sup> Lihat Laporan Pengumpulan Data dan Informasi "Permasalahan Investasi Daerah Setelah Otonomi Daerah", Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2012, hal. 32-33.

belakangan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi terjadi karena penurunan kapasitas perekonomian dan berbagai permasalahan regulasi, lahan, dan masalah perburuhan yang sangat menghambat dalam pengembangan potensi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat adalah sektor-sektor bangunan, pengangkutan, telekomunikasi dan jasa-jasa tersebut yang utama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan jasa-jasa. Sektor listrik meningkat sangat tinggi karena pada tahun terakhir ada pembangunan pembangkit listrik. Untuk Kota Batam pertumbuhan ekonomi untuk tiga tahun terakhir masih didominasi oleh sektor bangunan, terutama pada tahun 2009. Hal ini merupakan dampak semakin meningkatkan kebutuhan untuk perumahan serta perkantoran untuk mendukung kegiatan di Batam. Demikian pula hal pada sektor listrik, gas, dan air mengikuti pertumbuhan sektor yang merupakan pelengkap. Sedangkan Kabupaten Karimun masih dalam tahapan awal dalam proses pembangunan pada suatu kawasan, di mana sektor bangunan masih yang tertinggi. Sektor industri pengolahan, juga menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat.

Berdasarkan hasil analisis potensi ekonomi pada daerah untuk mengetahui sektor basis dan sektor berdasarkan nilai (*Location Quotient*) dalam studi kasus Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa walaupun satu sisi sektor tertentu mengalami pertumbuhan yang tinggi, namun untuk sektor bangunan dan listrik di Kota Batam belum merupakan basis potensial, namun untuk sektor listrik, gas, air, perdagangan, hotel dan terutama sektor industri pengolahan yang seharusnya memperoleh perhatian serius untuk terus ditingkatkan. Sedangkan sektor perikanan yang merupakan potensi besar belum digarap secara serius.

Kabupaten Karimun, dengan tingkat pertumbuhan yang rendah namun dari hasil nilai (*Location Quotient*) menunjukkan ada 6 sektor potensial yang dapat dijadikan basis ekonomi, terutama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan potensi terbesar untuk dijadikan basis ekonomi. Demikian pula untuk sektor pertambangan dan galian juga merupakan basis yang sebenarnya belum tergarap secara serius. Sektor yang juga mendapat perhatian adalah lapangan usaha transportasi dan komunikasi serta jasa-jasa.

Perkembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, terutama Batam dan Karimun yang merupakan suatu kawasan ekonomi karena belum dimanfaatkannya secara optimal dari kondisi dan letak geografis bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Luas wilayah lautan dan banyaknya pulau merupakan potensi

hasil kelautan dan mengembangkan industri yang mendukung kegiatan ekonomi maritim yang berguna bagi kegiatan ekonomi daerah yang utama baik untuk industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi maupun bagi pengembangan pendidikan melalui penelitian kelautan.

Studi Kota Batam dan Karimun merupakan contoh kasus bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Namun hasil kajian ini dapat mengaplikasikan model dalam mengkaji potensi daerahnya dengan mudah, sederhana, dan aplikatif untuk melihat potensi daerahnya, terutama untuk daerah yang hendak dimekarkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sektor-sektor yang merupakan potensi ekonomi yang merupakan basis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan Kabupaten Karimun, maka dengan ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri seharusnya diarahkan untuk sektor-sektor basis yang menjadi andalan Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari pihak pemerintah dan badan pengelola Kawasan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor andalan melalui pembagian kewenangan dan konsistensi peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan panduan dalam bentuk Undang-Undang yang terperinci yang mengatur permasalahan tersebut.

Secara umum dari uraian studi kasus daerah Kota Batam dan Kabupaten Karimun, pemilihan dan aplikasi strategi pengembangan ekonomi lokal menjadi begitu krusial dalam konteks desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah seperti sekarang. Langkah awal ini seharusnya merupakan suatu prasyarat bagi setiap daerah otonom, terutama apabila suatu daerah otonom tidak persis mengetahui posisi dan berkah sumber dayanya (*resource endowments*) sendiri.

Perlu pendalaman guna mengkaji mengenai potensi ekonomi daerah sektor basis, dalam melihat sektor-sektor dan subsektor ekonomi yang lebih terperinci dengan menggunakan data dalam kurun beberapa tahun. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut tentang pengelompokan sumber-sumber proposi pertumbuhan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Dengan hasil analisis, pemerintah dalam hal ini Kota Batam dan Kabupaten Karimun serta Badan Pengelola kawasan harus memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi ekonomi yang merupakan basis. Paling tidak dari sisi kebijakan

dan perencanaan disesuaikan regulasi, infrastruktur, serta anggaran yang dialokasikan untuk sektor basis dalam kedua daerah tersebut. Sebagai tujuan utama dari pengembangan kawasan dalam era otonomi memang sukar untuk mengatakan bahwa secara pasti masyarakat untuk Kota Batam dan Kabupaten Karimun akan sejahtera tingkat ekonominya bila dapat menggali potensi ekonominya. Karena hal ini juga tergantung dari sumber daya manusia yang mengelola potensi daerah yang merupakan variabel ekonomi, dan tentunya *nonekonomi*. Bahwa kemampuan tersebut tidak saja ditentukan potensi sebagai sumber daya alamnya, namun SDM juga tergantung dari tingkat pendidikan, kewirausahaan, serta semangat masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi baik yang basis dan sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Airov, J. "Fiscal Policy Theory in an Interregional Economy: General Inter-Regional Multipliers and Their Application", *Papers and Proceedings of Regional Science Associations*, Vol. 19, 1967, and Engerman. R. A, *Regional Aspects of Stabilisation Policy, dalam Musgrave, Essays in Fiscal Federalism, Brookings Institution, Washington DC., 1965.*
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1999.
- Boudeville, J. *Problems of Regional Economic Planning*. Edinburg University Press, 1966.
- Jaya Aziz, Iwan. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994.
- Jhingan, M. L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Perraoux, F. *La Notion de Pole de Croissance, l'économic de Xxeme Siècle*, second part. Presses Universitaires de France, 1964.
- Pfouts Ralf. W. *The techniques Of Urban Economic Analysis*. West Trenton New Jersey: Chander Davis-Publishing Company, 1960.
- Richardson, Harry W. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit FE UI, 1977.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Edisi 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Tiebout, Charles Mills. *The Community Economic Base Study, Committee for Economic Development*, New York, December 1962.

### Dokumen Resmi

- Badan Pusat Statistik. Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Daerah Provinsi Kepri 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik. Karimun Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Laporan Pengumpulan Data dan Informasi. "Permasalahan Investasi Daerah Setelah Otonomi Daerah". Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi dan Informasi sekretariat Jenderal DPR RI, 2012.

### Surat Kabar

- "Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, Perlu Direstrukturisasi Menata Ulang Kawasan FTZ", *BBK. Koran Jakarta*. 2 Maret 2013.

### Tulisan dalam Internet

- "Otonomi dan Keuangan Daerah, Masih Jauh Panggang dari Api". (<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/07/31/232685>, diakses 31 Juli 2013).
- "Habibie Menyesal Soal Batam". (<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/30/058517646/>, diakses 30 September 2013).
- "Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran: Peringkat Kepri Turun ke Urutan Kelima". ([http:// batamtoday.com/detail\\_berita.php?id=3432](http://batamtoday.com/detail_berita.php?id=3432), diakses 26 April 2011).